

Politik. Ekonomi ISLAM

Banyak para pemikir kontemporer yang menanyakan perihal sejarah kejayaan Islam ini dengan pertanyaan "apakah ada Negara Islam (Khilafah) itu?" Secara legal formal memang Negara Islam (Khilafah) hanya terjadi selama pemerintahan Khulafaur Rashyidin pada abad ke VII sampai ke VIII atau berlangsung selama 26 tahun saja, setelahnya tidak ada lagi Khilafah. Bahkan penguasa dalam beberapa abad berikutnya memakai sistem Kerajaan (Dinasti) yang dipimpin seorang Raja secara turun temurun bergantian dalam satu keturunan dan silsilah. Namun meski begitu, jejak peradaban yang diwariskan oleh Islam sejak abad VII sampai abad XIX sangat terasa oleh umat manusia. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang berkembang di daratan Eropa dan dunia Barat saat ini tidak terlepas dari kontribusi Islam di masa lalu. Hal ini tentu karena sistem tata negara, kebijakan politik, sosial, ekonomi, yang diterapkan dengan begitu berpihak pada rakyat. Statemen ini mungkin kontradiktif dengan beberapa referensi sejarah Islam yang umumnya menguraikan "keperkasaaan" tentara Islam dalam berbagai peperangan merebut wilayah baru yang didudukinya.

Secara substantif untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik (*baldata thoyyibah*) tidak perlu secara legal formal menjadikan Islam sebagai sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan adanya *political will* pemerintah yang menyerap nilai-nilai Islam kemudian dielaborasi dalam konteks sistem kenegaraan tersebut. Ini pun jika diyakini nilai-nilai Islam itu berdampak pada kemaslahatan bersama. Di samping *political will*, tentu moral pemerintahan harus baik. Kemakmuran suatu bangsa tidak akan terwujud dengan moral hazard. Kita telah cukup melihat bagaimana teladan yang dicontohkan oleh para Pemimpin Islam dalam uraian sejarah. Betapa kaya dan makmurnya suatu bangsa, jika pemerintahannya korup dan sarat dengan kecurangan-kecurangan dalam memainkan peran pemerintahan, meski ditopang dengan sistem pemerintahan yang ideal (sistem khilafahkah, kerajaankah, atau republik-kah), tetap kehancuran suatu bangsa tidak bias dielakkan.

Maka, jika kekuasaan adalah pelabuhannya, politik adalah kendaraan yang mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan pemilik kekuasaan itu. Jika politiknya baik, tujuan kekuasaan akan berakhir baik. Sebaliknya jika politik tidak baik, maka kekuasaan akan berakhir pada kehancuran. Selamat membaca!

POLITIK EKONOMI ISLAM

Editor: Suad Fikriawan
Alvien S. Haerisma

POLITIK EKONOMI ISLAM

Analisis Wacana Keislaman
Abad VII-XIX M

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Musa Asya'arie

Editor:
Suad Fikriawan, Alvien S. Haerisma

POLITIK EKONOMI ISLAM

Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M

Editor:

Suad Fikriawan

Alvien Septian Haerisma

POLITIK EKONOMI ISLAM
(Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M)

Penulis:

- Ahmad Ibandi
- Suad Fikriawan
- Alvien Septian Haerisma
- Helmy Haris
- Ambo Dalle
- Moh. Nur Hidayat
- Ratih Purbowisanti
- Usman
- Muhammad Tho'in
- Sumadi
- Rusnaena

Editor:

Suad Fikriawan
Alvien Septian Haerisma

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Musa Asy'arie

Cetakan, 2017

Penerbit:

LESFI
Jl. Solo Km. 8, Nayan, No.108A Yogyakarta
E-mail: kksjogja@gmail.com

ISBN: 979-602-xxx-xx

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya buku Politik Ekonomi Islam (Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M) sebagai kumpulan makalah diskusi kelas S3 Ekonomi Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang sekarang berada di tangan pembaca bisa diterbitkan. Buku ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan Ekonomi Islam yang terasa masih kurang, terutama dalam memahami Ekonomi Islam dalam pespektif sejarah. Hal ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi Islam dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam yang cukup panjang.

Ekonomi Islam dalam prakteknya selalu berpihak pada rakyat kecil, mereka yang lemah dan mereka yang terpinggirkan. Konglomerasi dapat dikembangkan melalui proses alamiah, bukan konglomerasi yang mendapatkan proteksi kebijakan politik ekonomi yang dilakukan Pemerintah melalui kolusi dan nepotisme di pusat kekuasaan pemerintahan yang ada.

Selama ini perkembangan ekonomi Islam, yang seringkali juga disebut ekonomi syari'ah, lebih ditekankan dalam aspek keuangan dengan tekanan pada lembaga keuangan dan perbankan. Sedangkan sektor-sektor di luar keuangan, kurang mendapatkan perhatian yang memadai, seperti perburuhan, sumber daya alam, industri dan ekonomi digital.

Padahal dalam catatan sejarah pemerintahan Islam dapat dibaca bahwa kebijakan ekonomi Islam tidak hanya diterapkan di sektor keuangan saja, tetapi juga di sektor riil yang meliputi perdagangan, pertanian, industry pengolahan serta distribusinya, wisata, perhotelan dan penyelenggaraan peribadatan, terutama haji dan umroh yang

melibatkan bisnis di bidang transportasi, akomodasi, kesehatan dan makanan.

Sudah waktunya ekonomi Islam yang berpihak pada pembelaan dan pemberdayaan kaum yang lemah dan dilemahkan dapat mendapatkan perhatian yang lebih besar, bukan hanya di sektor keuangan saja, tetapi juga disektor riil di mana terdapat kesenjangan yang sangat tajam, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan termiskinkan. Karena itu, ekonomi Islam semestinya harus dapat memperkecil kesenjangan dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan ekonomi dan pemerataannya.

Tugas khalifatullah fil ardli sesungguhnya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di muka bumi. Alquran menjelaskannya dalam firman berikut ; Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. [Quran 38:26]. Dalam ayat lain dijelaskan ; Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. [Quran 59:7]

Keberpihakan ekonomi Islam harus dapat diwujudkan dalam kehidupan yang damai tanpa kekerasan, karena konflik kekerasan akan menggerus keberpihakan untuk mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan yang merata. Dalam kenyataannya kapitalisme dan sosialisme dapat diletakkan sebagai alat untuk bisa mewujudkan keberpihakan pada keadilan dan pemerataan. Di situlah sebenarnya substansi ekonomi Islam.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat disusul dengan buku-buku ekonomi Islam berikutnya, amiin.

Klaten, 7 April 2017

Musa Asy'arie

PENGANTAR EDITOR

Sejarah bukanlah sekadar momen-momen *anamnesis* atau kenangan. Sejarah yang demikian hanyalah sekadar *Historie*. Meminjam istilah Martin Heidegger, filosof asal Jerman yang terkenal dengan refleksinya tentang makna menjadi manusia otentik di tengah dunia yang banal ini. Sejarah bukanlah kisah tentang kematian, melainkan tentang sesuatu yang hidup (*Geschichte*), demikian katanya. Daya hidup sejarah itulah yang memungkinkan kita melampaui (*beyond*) segala rantai kekangan masa lalu sekaligus memberanikan kita untuk tetap menabur imajinasi dan harapan tentang masa depan yang selalu “harus” lebih baik dan lebih beradab. Demikianlah, buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini tidak lagi dibaca hanya sebagai pelampiasan naluri manusiawi kita akan kenangan masa lalu. Meski berbicara tentang masa lalu, tetapi kandungan buku ini pada hakikatnya menggenggam tekad para Pahlawan Muslim yang berjuang dengan tidak hanya mempercayai slogan “*Hidup Mulia atau Mati Syahid*” dengan orientasi *Ghanimah* semata, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mereka membebaskan rakyat yang terbelenggu dan terkungkung dalam kegelapan dan kebodohan oleh tirani Penguasa. Memberikan cahaya Islam yang benar dan Agung di Sisi Allah dan meninggalkan ketersesatan hidup di bawah cengkraman kolonial dan rezim yang lalim. Membentuk sebuah peradaban yang cinta akan pengetahuan, keberpihakan pada rakyat, yang berdampak pada kemaslahatan dunia dan akhirat.

Banyak para pemikir kontemporer yang menanyakan perihal sejarah kejayaan Islam ini dengan pertanyaan “apakah ada Negara Islam (*Khilafah*) itu?”. Secara legal formal memang Negara Islam (*Khilafah*) hanya terjadi selama pemerintahan *Khulafaur Rashyidin*

pada abad ke VII sampai ke VIII atau berlangsung selama 26 tahun saja, setelahnya tidak ada lagi *Khilafah*. Bahkan penguasa dalam beberapa abad berikutnya memakai sistem Kerajaan (Dinasti) yang dipimpin seorang Raja secara turun temurun bergantian dalam satu keturunan dan silsilah. Namun meski begitu, jejak peradaban yang diwariskan oleh Islam sejak abad VII sampai abad XIX sangat terasa oleh umat manusia. Ilmu Pengetahuan dan Kemajuan teknologi yang berkembang di daratan Eropa dan dunia Barat saat ini tidak terlepas dari kontribusi Islam di masa lalu. Hal ini tentu karena sistem tata negara, kebijakan politik, sosial, ekonomi, yang diterapkan dengan begitu berpihak pada rakyat. Statemen ini mungkin kontradiktif dengan beberapa referensi sejarah Islam yang umumnya menguraikan “keperkasaan” tentara Islam dalam berbagai peperangan merebut wilayah baru yang didudukinya.

Sebenarnya, dibalik “keperkasaan” itu, tersimpan kelemahan lembut dan kecintaan yang jarang di uraikan dalam buku-buku sejarah Islam. Bagaimana ketakutan dan kegelisahan yang dirasakan Umar Bin Khattab saat menerima jutaan Dinar *Ghanimah* dari negeri subur (Persia, Syiria, dan Mesir) sebagai isyarat yang dilihatnya sebagai tanda perpecahan dan melemahnya Umat Islam. Kemudian bagaimana kezuhudan Umar bin Abdul Aziz saat beliau berkuasa dengan menyerahkan seluruh harta bendanya ke *Baitul Maal* sebagai konsekwensi atas dosa menghambur-haburkah harta negara saat beliau menjadi putra mahkota, yang dalam suatu kisah diceritakan bahwa kegemarannya berfoya-foya hampir menghabiskan setengah dari pendapatan *baitul maal* setiap tahunnya. Dan terakhir kita lihat bagaimana seorang Ghazan Khan cucu dari Jengish Khan dari keturunan Khan yang Agung merubah haluan hidupnya dan Agamanya kepada Islam dan berdampak pada tatanan kerajaan Illkhan secara drastis. Pada saat kakeknya melakukan infasi ke negeri-negeri Islam yang berakhir dengan kehancuran besar-besaran kota Baghdad sekaligus kehancuran

Dinasti Islam pada masa itu, justru cucunya mendapatkan anugerah Islam dan membangun kembali peradaban Islam yang dulu telah dihancurkan kakeknya.

Bila belajar dari sepeinggal kisah diatas, secara substantif untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik (*baladatu thoyyibah*) tidak perlu secara legal formal menjadikan Islam sebagai sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan adanya *political will* pemerintah yang menyerap nilai-nilai Islam kemudian dielaborasikan dalam konteks sistem ke-negara-an tersebut. Ini pun jika diyakini nilai-nilai Islam itu berdampak pada kemaslahatan bersama. Di samping *political will*, tentu moral pemerintahan harus baik. Kemakmuran suatu bangsa tidak akan terwujud dengan *moral hazard*. Kita telah cukup melihat bagaimana teladan yang dicontohkan oleh para Pemimpin Islam dalam uraian sejarah. Betapa kaya dan makmurnya suatu bangsa, jika pemerintahannya korup dan sarat dengan kecurangan-kecurangan dalam memainkan peran pemerintahan, meski ditopang dengan sistem pemerintahan yang ideal (sistem khilafahkah, kerajaankah, atau republik-kah), tetap kehancuran suatu bangsa tidak bias dielakkan.

Proses penanaman moral itu tidak hanya dilakukan kepada pemerintahannya saja tetapi rakyat juga memerlukan sistem pendidikan moral yang baik. *Political will* dan pendidikan moral yang baik dalam suatu bangsa akan mewujudkan tatanan sosial yang beradab, dan sistem ekonomi yang maju. Kita lihat bagaimana Malaysia sejak akhir abad XIX M pasca terjadinya konflik antar etnis, melakukan reformasi sistem pemerintahan yang berprinsip pada nilai Islam namun tidak menampakkan Islam secara legal formal dengan tetap mengakomodir kepentingan-kepentingan agama lain. Sistem ini kemudian diformulasikan dalam berbagai kebijakan di sektor-sektor setrategis dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Serta membidik potensi lokal yang bisa ditawarkan pada dunia internasional sehingga Malaysia dalam waktu singkat

menjadi negara yang maju dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial ekonomi.

Maka, jika kekuasaan adalah pelabuhannya, politik adalah kendaraan yang mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan pemilik kekuasaan itu. Jika politiknya baik, tujuan kekuasaan akan berakhir baik. Sebaliknya jika politik tidak baik, maka kekuasaan akan berakhir pada kehancuran. Dan sebagai kata terakhir, ijinakan saya mengutip sepenggal syair dari sebuah buku tentang Khalifah Umar bin Khattab berikut ini” *Tidak ada keceriaan yang bersemi di wajahnya. Tuhan kan kekal, sedang harta dan anak akan binasa. Ia tidak pernah merasa cukup dengan gudang hartanya yang hina itu. Telah kuupayakan agar tetap abadi, tapi mereka semua takkan abadi. Tidak pula Sulaiman. Padahal angin, manusia, dan jin, tunduk padanya. Kemana kesudahan para raja, di mana delegasi yang dahaga datang dari dari segala penjuru ke danau istana?. Suatu hari nanti, tempat kembali tu pasti akan didatangi, sebagaimana mereka semua mendatangnya”.*

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Suad Fikriawan

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	iii
<i>Prof. Dr. Musa As'ary</i>	
PENGANTAR EDITOR	vi
<i>Suad Fikriawan, M.A</i>	
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 POLITIK EKONOMI ARAB SEBELUM DAN SEMASA MUHAMMAD SAW	1
<i>Ahmad Ibandi</i>	
BAB 2 POLITIK EKONOMI MASA KHULAFUR RASYIDUN (Kebijakan Khalifah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, dan Utsman bin Affan)	23
<i>Suad Fikriawan</i>	
BAB 3 POLITIK EKONOMI DINASTI UMAYYAH: Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Nasar bin Sayyar	47
<i>Alvien Septian Haerisma</i>	
BAB 4 POLITIK EKONOMI ISLAM DI ANDALUSIA	59
<i>Helmy Haris</i>	
BAB 5 POLITIK EKONOMI MASA DINASTI ABBASIYAH: Kebijakan Nizam Al-Mulk	78
<i>Ambo Dalle</i>	

Bab 6	POLITIK EKONOMI MASA DINASTI ISLAM DI AFRIKA	100
	<i>Moh. Nur Hidayat</i>	
Bab 7	POLITIK JALUR PERDAGANGAN ASIA-AFRIKA-EROPA ABAD IX-X MASEHI	115
	<i>Ratih Purbowisanti</i>	
Bab 8	POLITIK EKONOMI GHAZAN KHAN (1295-1304 M), DAN PEMBARUAN EKONOMI ALAUDDIN KHALJI (1296 -1316M)	128
	<i>Usman</i>	
Bab 9	POLITIK EKONOMI DINASTI MUGHAL SULTAN AKBAR DAN SULTAN AUGRANGZEB ..	157
	<i>Muhammad Tho'in</i>	
BAB 10	POLITIK EKONOMI ISLAM DI MALAYSIA DAN BRUNAI DARUSSALAM	169
	<i>Sumadi</i>	
BAB 11	POLITIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	205
	<i>Rusnaena</i>	



POLITIK EKONOMI DINASTI UMAYYAH: Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Nasar bin Sayyar

Alvien Septian Haerisma

A. Pendahuluan

Kajian sejarah yang tidak pernah habisnya diperbincangkan, dengan berbagai aspek dalam kehidupan dapat dikaitkan melalui napak tilas sejarah. Sejarah sebagai laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi yang meliputinya bersifat individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri. Perjalanan sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti ini akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer, hal ini akan memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya wacana tentang ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas secara konseptual dan aplikatif (Kahf, 1995).

Pertumbuhan historiografi Islam sejak fase-fase awal di balut penuh dengan perkembangan *siyasa*h diantara kaum muslimin.

Pertumbuhan historis Islam amatlah jelas terdapat hubungan antara perkembangan politik dan keagamaan dan pembentukan tradisi historiografi Islam (Azra, 2002). Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya kekuasaan yang berpola dinasti atau kerajaan. Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan foedal dan turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah *Khulafaur Rasyidin*.

Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai'atan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Jatuhnya Ali dan naiknya Mu'awiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij (kelompok yang menentang dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian tampak kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'awiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sesudahnya adalah diserahkan kepada ummat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41 H dan dikenal dengan nama jama'ah karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam menjadi satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola pemerintahan menjadi kerajaan. Meskipun begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru dalam kemajuan peradaban Islam, utamanya tatanan negara dalam bidang politik dan ekonomi.

Bahasan penulis kali ini tidak lagi mengurai tentang polemik kekuasaan dan peralihan secara turun temurun penguasa dnasti Umayyah, akan tetapi penulis tertarik mengurai bagaimana politik ekonomi Umar bin Abdul Aziz dalam memulihkan kondisi negara yang mengalami krisis ekonomi dan politik mencapai masa paling gemilang sepanjang sejarah kekuasaan Dinasti Umayyah serta kebijakan Gubernur Khurasan Nassar bin Sayyar yang membawa Dinasti Umayyah berakhir dengan kehancurannya.

B. Periodesasi Masa Bani Umayyah

Daulah Bani Umayyah yakni negara yang banyak melakukan perluasan wilayah dan peletak peradaban. Bani Umayyah berdiri pada tahun 40 dan berakhir pada tahun 132 Hijriyah. Dalam rentang waktu ini terdapat tiga masa yang merupakan masa terbaik umat Islam. Tepatnya, masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in. karena masa yang dimaksud diatas tersebut "generasi". Seperti hadits Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW yang mengatakan: *"Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian masa selanjutnya, kemudian masa selanjutnya"* (Qardhawi, 2005).

Dalam literasi atau sumber sejarah peradaban Islam sangatlah banyak terutama tentang periodesasi masa Bani Umayyah. Inilah disebutkan *Period of Dinasti Umayyah*, diantaranya (Latif, 2014):

1. Mu'awiyah bin Abu Sufyan (41-60 H/ 661-680 M)
2. Yazid bin Mu'awiyah (60-64 H)
3. Mu'awiyah bin Yazid (64 H)
4. Marwan bin Al-Hakam (64-65 H)
5. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H)
6. Walid bin Abdul Malik (86-96 H)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H)
8. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H)
9. Yazid bin Abdul Malik (101-105 H)
10. Hisham bin Abdul Malik (105-125 H)

11. Walid bin Yazid bin Abdul Malik (125-126 H)
12. Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik (126 H)
13. Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik (127 H)
14. Marwan bin Muhammad bin Marwan (127-132 H)

C. Biografi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Ia bernama Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abul Ash bin Umayyah bin Abdussyamsi. Ibunya adalah Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin al-Khathab. Umar bin Abdul Aziz adalah anak dari keluarga Umayyah dan Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, dan pamannya adalah Abdul Malik bin Marwan dan keduanya pendiri Bani Umayyah. Ayahnya Umar bin Abdul Aziz akan menikahi ibunya Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin al-Khathab dengan mahar seberat 400 dinar dan keduanya masih keturunan ahli bait (Abdurrahman, 1984). Beliau dilahirkan di Madinah al-Munawwarah. Beberapa silang pendapat tentang tahun lahir Umar bin Abdul aziz antara tahun 59/61/62 H (Latif, 2014). Sebelum menjadi khalifah, dia adalah penguasa di Madinah dan tenggelam dalam kemewahan yang biasa dilakukan oleh Bani Umayyah (Usairy, 2012).

Khalifah lebih mencurahkan energinya untuk membangun dan mengislamkan negara dan rakyat daripada melakukan ekspansi dan mengumpulkan kekayaannya. Beliau menerapkan keadilan dan pemerataan bidang ekonomi dengan menegakkan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh di daerah dan akhirnya rakyat berduyun-duyun masuk Islam. Saat inilah masa keemasan dakwah Islam di Asia Tengah dan sekitarnya (Karim, 2014).

Sebelum meninggal, beliau meminta kepada anak pamannya Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnul-Abbas yang bermukim di Hamimah Yordania untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah dan menyerahkannya untuk Ahli Bait Rasulullah. Sejak itulah, tahun 100 H/718 M., dia mulai merancang rencana ini dengan serius. Umar

bin Abdul Aziz meninggal pada bulan Rajab 101 H/719 M. Dia memerintah selama dua tahun lima bulan. Pemerintahannya adalah sebuah nikmat bagi kaum muslimin dan Islam (Usairy, 2012).

D. Politik Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abd Al-Aziz, ketika dinobatkan sebagai khalifah, beliau menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha meredakan ketidakpuasan yang merebak di kalangan muslim baru dengan menata ulang prinsip lama para pendahulunya bahwa seorang muslim, baik Arab maupun *mawla* (Abdullah, 2010). Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, dia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan syi'ah. Dia juga member kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diperingan, kedudukan *mawali* disejajarkan dengan muslim Arab (Yatim, 1993).

Umar bin Abdul Aziz (Umar II) adalah seorang khalifah yang saleh dan jujur termasuk dalam penegakan hukum dan keadilan. Umar II melaksanakan tugasnya dengan tegas apalagi berhadapan dengan orang-orang pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di zamannya. Contoh ini terbukti dengan kasus penggelapan pajak seorang Gubernur yang kemudian dipecat dan diasingkan ke Pulau Siprus yakni Yazid bin Muhallab di Khurasan. Umar II memusatkan kebijakannya untuk membangun negerinya secara moril. Beliau memberantas KKN dari diri sendiri, keluarga pejabat dan kemudian rakyat yang melakukan tindak kecurangan dan sebagainya (Karim, 2014).

Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) dalam bidang ekonomi, diantaranya:

1. Memfungsikan kembali Baitul Maal, ketika mendapatkan harta yang diperoleh secara tidak benar khalifah menyitanya dan dikembalikan ke Baitul Maal. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya (Chamid, 2010). Profil seorang Umar II adalah pria yang sangat rendah hati, walaupun terkesan sangat mewah seperti kuda-kuda khalifah. Dia memiliki kuda-kuda dari kandang kerajaan dijual melalui lelang umum dan hasil disimpan di Baitul Maal (Mahmudunnusair, 1994).
2. Membebaskan pungutan dari *Jizyah*¹ (upeti) dan *Kharaj*² dari orang-orang yang baru masuk Islam (Sholihin, 2010). Tujuan kebijakan ini diharapkan warga yang masuk Islam semakin banyak (Latif, 2014), namun implikasi dari kebijakan tersebut

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), 371. *Jizyah* dapat dimaknai: 1. Pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan. 2. Pembayaran harta yang diwajibkan atas warga Negara non muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 29 yang artinya: (sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk). 3. Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sd Dzulhijjah).

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku*, 450. Pengertian *Kharaj* (Pajak Tanah) yaitu pajak yang dipungut dari tanah *kharaj* atau pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim atau pajak tanah secara umum. Pajak atas tanah (*land tax*), *Kharaj* ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (*land productivity*). *Al-Kharaj* adalah semacam pajak bumi yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah, hanya saja bedanya *al-kharaj* lebih ringan dibanding PBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan pungutan ini juga hanya diberlakukan atas orang-orang nonmuslim yang berdomisili di negara Islam dan mendapatkan izin untuk menggarap/mengolah sebagian dari lahan negara.

adalah gaji bagi tentara berkurang. Akhirnya khalifah mengeluarkan dekrit pada 100 H, yang berisi (Karim, 2015):

- a. apabila seseorang yang hendak masuk Islam maka tanahnya wajib diberikan kepada saudaranya yang non muslim, hal ini untuk menghindari mereka guna membayar pajak terhadap negara.
 - b. Kalau mereka mau menggarap tanahnya sendiri, maka ia tetap dikenakan pajak lima puluh persen.
3. Reformasi keuangan dan administrasi diantaranya bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keseimbangan ditengah masyarakat, sehingga tidak ada seorang miskinpun yang membutuhkan sedekah atau zakat.³
 4. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman bahwa mereka mengambil zakat harta dari pemberian yang di terima seseorang dari harta negara. Setelah utsman meninggal, pendapatan negara melalui zakat menurun kecuali di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka langsung bersegera membayarkannya melalui negara (ash-Shalabi, 2012).
 5. Memaksimalkan kantor-kantor administrasi yang berada dalam kendali pengawasannya, seperti: Kantor surat menyurat, Kantor stempel, Kantor perhubungan dan surat menyurat, Tatanan para juru tulis (ash-Shalabi, 2012).
 6. Menerapkan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak harus membayar *upeti* kepada pemerintah pusat.

³ Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit*, 224, makna Zakat, merupakan hak Allah SWT tetapkan atas orang-orang kaya bagi orang-orang fakir, miskin dan kekurangan serta kaum musta'bidin, tidak boleh meremehkannya. Umar mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan baik.

7. Sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, ketika stabilitas perekonomian masyarakat membaik (Chamid, 2010).

E. Kegagalan Kebijakan Nasar Bin Sayyar (Gubernur Khurasan)

Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) wafat lalu diganti oleh khalifah Yazid bin Abdul Malik (101-105 H) tidak terjadi ekspansi atau penyebaran Islam di kawasan Asia Tengah yang berarti karena ia sangat lemah sebagai seorang penguasa. Yazid II wafat lalu diganti oleh saudaranya yaitu khalifah Hisham bin Abdul Malik (105-125 H) mulai memiliki semangat baru, ia menguasai kembali daerah-daerah yang hilang sebelumnya. Ia berhasil mengatasi pemberontakan yang terjadi di asia tengah seperti suku-suku Turgesh yang dipimpin Khan Su-Lu dengan bantuan Cina. Dengan bantuan saudaranya, Asad akhirnya Khan Su-Lu bisa ditumpas. Khalifah menerapkan suatu usaha yang sangat baik untuk menurunkan pemberontakan, perdamaian dan serta Islamisasi permanen maupun ekspansi selanjutnya. Cara itu ditempuh dengan asimilasi antara Arab dan pribumi setempat melalui jalur budaya (Karim 2014).

Setelah Assad meninggal, Nasar bin Sayyar diangkat menjadi Gubernur di Asia Tengah yang bermarkas di Khurasan. Para pengganti Hisyam, Walid II dan Yazid II dan Ibrahim tidak ada kemajuan baik dalam ekspansi maupun dalam penyebaran Islam di kawasan Asia Tengah. Khalifah XIV dari dinasti Umayyah, Marwan II mempertahankan Sayyar tetap menjadi penguasa di Khurasan (Karim 2014).

Bahwa semasa menjabat Gubernur Khurasan, Nasar bin Sayyar mencoba memperbaiki ekonomi dengan tujuan untuk membendung gerakan anti Umayyah melaluinya yang menerapkan *Kharaj* bagi semua rakyat dengan ukuran yang sama atau merata, naik bagi Muslim Arab, *marwali*, maupun Non Muslim dengan harus

membayar pajak bumi yang sama (50%) (Karim, 2015). Selama inilah diskriminasi pribumi- Arab yang menggoyahkan kedaulatan Umayyah yang sudah diambang kehancuran. Karena pemberontakan Abbasiyah terhadap Umayyah yang dipimpin Abu Muslim Khurasan jauh lebih kuat yang menjatuhkan kekuasaan Sayyar di Khurasan (747 M).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti bani umayah menjadi lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas maka terjadi sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dikalangan anggota keluarga istana (Hitti, 1970).
2. Latar belakang terbentuknya dinasti bani umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi dimasa Ali . sisa-sisa syi'ah (para pengikut Ali) dan Khawarij terus menjadi oposisi, baik secara tersembunyi seperti dimasa pertengahan kekuasaan bani umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah (Yatim, 1993).
3. Etnis antara suku Arabia utara (*bani Qays*) dan Arabia Selatan (*bani Kalb*) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Makin meruncing perselisihan ini mengakibatkan para penguasa bani umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, sebagian besar golongan *marwali* (non arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status *marwali* itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa arab yang diperlihatkan pada masa bani umayyah (Yatim, 1993).
4. Lemahnya pemerintahan daulat bani umayyah juga disebabkan oleh siap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan

tatkala mereka mewarisi kekuasaannya. Disamping itu golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang.

5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti bani umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al Abbas ibn abd al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari bani hasyim dan golongan syi'ah dan kaum mawali yang merasa dikelasduakan oleh pemerintah bani umayyah (Yatim, 1993).

F. Kesimpulan

Umar bin Abdul Aziz (Umar II) adalah seorang khalifah yang saleh dan jujur termasuk penegakan hukum dan keadilan. Umar II melaksanakan tugasnya dengan baik dan tegas apalagi berhadapan dengan orang-orang pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dizamannya.

Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) dalam bidang ekonomi, diantaranya:

1. Memfungsikan kembali Baitul Maal, ketika mendapatkan harta yang diperoleh secara tidak benar khalifah menyitanya dan dikembalikan ke Baitul Maal. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Profil seorang Umar II adalah pria yang sangat rendah hati, walaupun terkesan sangat mewah seperti kuda-kuda khalifah. Dia memiliki kuda-kuda dari kandang kerajaan dijual melalui lelang umum dan hasil disimpan di Baitul Maal.
2. Membebaskan pungutan dari *Jizyah* (upeti) dan *Kharaj* dari orang-orang yang baru masuk Islam.
3. Reformasi keuangan dan administrasi diantaranya bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keseimbangan ditengah masyarakat, sehingga tidak ada seorang miskinpun

yang membutuhkan sedekah atau zakat.

4. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman bahwa mereka mengambil zakat harta dari pemberian yang di terima seseorang dari harta negara. Setelah utsman meninggal, pendapatan negara melalui zakat menurun kecuali di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka langsung bersegera membayarkannya melalui negara.
5. Memaksimalkan kantor-kantor administrasi yang berada dalam kendali pengawasannya, seperti: Kantor surat menyurat, Kantor stempel, Kantor perhubungan dan surat menyurat, Tatanan para juru tulis.
8. Menerapkan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak harus membayar *upeti* kepada pemerintah pusat.
9. Sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, ketika stabilitas perekonomian masyarakat membaik.

G. Daftar Rujukan

- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ek. Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2010.
- Ghazali, Aidit dan Abul Hasan M. Sadeq (Ed). *Reading Islamic Economic Thought*. Longman Malaysia SDN, BHD. 1992.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan, 1970.
- Ibnu Jauzi, Imam Abul Faraj Abdurrahman. *Sirah Wamanaaqib Umar bin Abdul Aziz Khalifah*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1984 M.

- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995.
- Karim, M. Abdul. *Bulan Sabit di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam di Asia Tengah*. Yogyakarta: SUKA Press, Cet I, 2014.
- . *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, Cet.VI, 2015.
- Latif, Abdussyafi Muhammad Abdul. *Bangkit dan runtuhnya khilafah Bani Umayyah*. Jakarta: Al-Kautsar, Cet I, 2014.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam its Concepts and History*. New Delhi: Kitab Bhavan, 3rd Edition, 1994.
- Qaradhawi al-, Yusuf. *Distorsi Sejarah Islam*. Terj Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Robinson, Neal. *Islam A Concise Introduction*, T.t: Curzon Press: 1999.
- Shallabi ash-, Ali Muhammad. *Episode Krusial Sejarah Islam Mu'awiyah bin Abu Sufyan*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- . *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*. Jakarta: Darul Haq, Cet. III, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Usairy al-, Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

PROFIL PENULIS



✚ **Ahmad Ibandi.**, alamat e-mail: ahmad.ibandi@yahoo. com.

Pendidikan Formal: S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta Jurusan Ekonomi Akuntansi, S2 Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung konsentrasi Ekonomi Islam. Pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta



✚ **Suad Fikriawan.**, alamat e-mail: suad.fikriawan@gmail.com.

Pendidikan Formal: S1 UIN Maliki Malang Jurusan Ekonomi Manajemen, S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam. Pekerjaan tetap sebagai dosen Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo



✚ **Alvien S Haerisma.**, alamat e-mail: alvien nizam@yahoo.co.id.

Pendidikan Formal: S1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Ekonomi Perbankan Islam, S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



✚ **Helmi Haris.**, alamat e-mail; helmi.solo@gmail. com.

Pendidikan Formal: S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta



✚ **Ambo Dalle.**, alamat e-mail; alle.bohari@gmail.com.

Pendidikan Formal: S1 UIN Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam, S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam. Pekerjaan tetap sebagai direktur pemasaran Industri UD. Hamzah (Penggilingan Padi) Makasar.



✚ **Moch. Nurhidayat.**, alamat e-mail: moch.nurhidayat@yahoo.com.

Pendidikan Formal: S1 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Jurusan Teknik Industri, S2 Universitas Brawijaya Malang konsentrasi Manajemen Strategik.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Universitas Tribuna Tungga Dewi Malang.



✚ **Ratih Purbowisanti.**, alamat e-mail; ratihp33@gmail.com.

Pendidikan Formal: S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan Islam, S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Syariah.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta.



✚ **Usman.**, alamat e-mail; usmandachlan.usman@gmail.com.

Pendidikan Formal: S1 Universitas Diponegoro Jurusan Matematika, S2 Institut Teknologi Bandung Jurusan Rekayasa Sistem Perusahaan.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang.



Muhammad Tho'in., alamat e-mail; thoinsyakira@yahoo.com.

Pendidikan Formal: S1 IAIN Surakarta Jurusan Ekonomi Islam, S2 IAIN Surakarta Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)-AAS Surakarta.



Sumadi., alamat e-mail; sum_1924@yahoo.com.

Pendidikan Formal: S1 UNS Surakarta Jurusan Ekonomi Manajemen, S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)-AAS Surakarta.



Rusnaena., alamat e-mail; nena.amin05@gmail.com.

Pendidikan Formal: S1 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar Jurusan Muamalah, S2 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar Konsentrasi Ekonomi Islam.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.